



Universitas Mercu Buana
Fakultas Ilmu Komunikasi
Bidag Studi *Public Relations*
Geby Putri Herman
44214220213

Manajemen Isu Public Relations PT. PLN (Persero) Area Bogor dalam Menghadapi Berita Pencabutan Subsidi Listrik Tahun 2017 di Media Online
Jumlah halaman : vi + 88 halaman + 19 lampiran
Bibliografi : 19 acuan, Tahun 1999 - 2015

ABSTRAK

Manajemen isu *public relations* semakin dianggap penting di saat perusahaan sedang dihadapi dengan isu-isu di media. Media yang saat ini lebih sering digunakan adalah media *online* karena lebih mudah dan lebih cepat untuk di akses. PT. PLN (Persero) Area Bogor merupakan unit yang bertanggung jawab pada pelayanan publik. Saat ini PT. PLN (Persero) Area Bogor sedang dihadapi berita mengenai pencabutan subsidi listrik tahun 2017 di media *online*. Humaslah yang dibutuhkan dan bertanggung jawab dalam menghadapi berita tersebut. Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui mengapa PT. PLN (Area) Bogor turut mencabut subsidi listrik golongan 450VA dan 900VA. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah *public relations* dalam menghadapi berita pencabutan subsidi listrik tahun 2017 di media *online* dan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber. Hasil penelitian ini membahas mengenai alasan dicabutnya subsidi listrik dan mengenai langkah-langkah *public relations* dalam menghadapi berita pencabutan subsidi listrik agar masyarakat memahaminya dengan baik. Dengan demikian, peneliti mampu memperoleh gambaran mengenai latarbelakang pencabutan subsidi listrik dan memperoleh gambaran manajemen isu *public relations* yang dilakukan sehingga memberikan pemahaman yang baik untuk masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang pencabutan subsidi listrik ini dananya akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dan manajemen isu yang dilakukan yaitu memberikan klarifikasi kepada media bahwa hal ini merupakan kebijakan pemerintah dan melakukan program sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang baik.